

BAB I

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, yang merupakan perwujudan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran dalam ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi “Mengamankan perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat”. Dari penjelasan di atas sudah seharusnya BUMN memberikan pemasukan pada kas Negara atas laba yang diterimanya. Namun sayangnya, beberapa BUMN justru malah memberikan kerugian pada Negara (Widaningsih, 2015).

Semakin berkembangnya kompleksitas bisnis serta semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan resiko *fraud* pada perusahaan semakin tinggi (Dianingtyas, 2016). Pada saat ini *fraud* di Indonesia semakin hari semakin meluas, salah satu resiko yang paling besar adalah resiko *fraud* dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Modus korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa adalah memainkan harga dan jumlah satuan. Hal ini disebabkan tingginya kasus di bidang pengadaan barang dan jasa sangat rentan terjadi permainan belanja barang terutama dalam hal harga dan jumlah satuan.

Kecurangan bisa dilakukan dalam berbagai organisasi, bisa organisasi profit non profit, perusahaan sektor privat maupun publik, dan lembaga keuangan. Salah satu organisasi *provit* tersebut yang merupakan Badan Usaha Milik Negara adalah Bulog. Diketahui Bulog merupakan lembaga perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Skandal korupsi yang terjadi dan terkait dengan yayasan pemerintah dana non bujeter setidaknya, ada tiga kasus korupsi besar yang pernah menyita perhatian publik dalam jangka waktu cukup panjang.

Menurut Usman (2012) pada tahun 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan mengenai Kerugian yang terjadi di BUMN yang diperkirakan hampir mencapai Rp 1,5 triliun atau Rp 1.492.499.880.000,00. Adapun, sebanyak 125 BUMN lainnya mendapatkan laba. Hal ini dijelaskan pada Paparan Kinerja BUMN 2012. Mirisnya di sisi lain kerugian – kerugian yang dialami oleh beberapa BUMN ini berasal dari penyimpangan keuangan.

Menurut Sawyer (2006), *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja. Menurut Hall (2007), mengatakan bahwa *fraud* merupakan suatu kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan yang memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *fraud* merupakan tindakan diluar hukum atau melanggar hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Menurut Cressey (1953) praktik *fraud* dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari suatu entitas, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dapat merugikan keuangan pihak lain

bahkan keuangan perusahaan dan negara. Pelaku *fraud* umumnya merupakan pegawai atau orang yang bekerja dalam suatu organisasi tempat fraud tersebut dilakukan, karena orang tersebut cenderung lebih memahami situasi dan kondisi operasional organisasi tersebut. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fraud tertuang dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*). *Fraud triangle* tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan didasarkan atas 3 faktor tersebut, yaitu: (1) Tekanan (*pressure*), (2) Kesempatan (*Opportunity*), (3) Rasionalisasi (*razionalization*).

Menurut Cressey (1953) Tekanan (*pressure*) adalah motivasi yang timbul dari pelaku kecurangan yang bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya. Hal ini biasanya meliputi tekanan baik keuangan maupun non keuangan, tekanan dari pribadi maupun organisasi (kepemimpinan, tugas yang terlalu berat, dan lain-lain). Tekanan juga datang dari hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain.

Kesempatan (*opportunity*) adalah pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Biasanya disebabkan karenainternal kontrol suatu organisasi yang lemah (kelemahan sistem, kebijakan, prosedur, proses serta gagal dalam mendisiplinkan atau memberikan sanksi pelaku fraud), kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan seorang karyawan mempunyai kuasa dan kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga karyawan memiliki kesempatan dalam melakukan *fraud*.

Rasionalisasi (*razionalization*) adalah sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari pribadi karyawan untuk merasionalkan tindakan fraud yang dilakukannya. Pembetulan yang dilakukan pelaku merupakan bagian yang

harus ada dalam tindakan kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi.

Dari ketiga elemen *fraud triangle*, kesempatan merupakan elemen yang paling berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya resiko *fraud* dengan melakukan pengawasan lebih dini dalam suatu instansi atau organisasi. Dalam penelitian ini yang membuka kesempatan pada resiko *fraud* adalah Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, sistem pengendalian internal, dan peran audit internal.

Dianingtyas (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendeteksi risiko *fraud* di PT. Kaltim Industrial Estate. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Senada dengan penelitian Rahma, Umi, dkk (2016) bahwa hasil penelitian menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* di pengadaan barang dan jasa. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi maju mundurnya proses kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tergantung seberapa baiknya seorang pemimpin dalam memainkan perannya agar organisasi terus berkembang. Maka dari itu seorang pemimpin harus benar-benar memperhatikan gaya kepemimpinannya dalam mempengaruhi, mengarahkan kegiatan anggota kelompoknya serta mengkoordinasikan tujuan anggota dan tujuan organisasi. Dengan begitu karyawan akan senantiasa mengikuti peraturan dari pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang baik. Hasil yang diperoleh dari penelitian Rahma, Umi, dkk (2016) membuktikan bahwa adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan dan terhadap *fraud* di pengadaan barang dan jasa. Hal ini

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di instansi tersebut cukup memadai dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

Budaya organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi (Robbins, 2008). Budaya yang tidak baik dalam suatu organisasi juga sangat berpeluang terjadi *fraud*. Kasus yang menimpa Bulog juga berdasar dari sistem budaya yang tidak baik, bahwa 10 kasus yang terjadi rata-rata dilakukan oleh pejabat strategis lingkungan Perum Bulog, baik divisi pusat maupun regional. Dianingtyas (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendeteksi risiko *fraud* di PT. Kaltim Industrial Estate. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Hal ini tentu berdampak pada lingkungan internal Bulog, dimana kasus-kasus yang terjadi merupakan *wasiat* turun temurun yang kemudian menjadi sebuah budaya *fraud*.

Menurut Dianingtyas (2016) Efektivitas dari sistem pengendalian internal juga mempengaruhi terjadinya *fraud*. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2001), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu (1) keadaan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi resiko terjadinya *fraud*. Menurut penelitian dari Zelmiyanti (2015) menyatakan bahwa Pelaksanaan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan di BPR

Sumatera Barat. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Dianingtyas (2016), dan Widyaswari (2017), yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal yang sangat efektif dalam hal penaksiran resiko *fraud*.

Widaningsih (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap Pencegahan dan pendeteksian kecurangan (Fraud) study kasus pada BUMN yang berpusat di kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh antara profesionalisme auditor internal terhadap Pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung memiliki profesionalisme auditor internal yang sangat baik. Zelmiyanti (2015) melakukan penelitian dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BPR Sumatera Barat. Berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lembaga perbankan khususnya BPR yang memiliki tujuan untuk meningkatkan usaha mikro yang ada di daerah. Senada dengan penelitian Sugiman (2016) membuktikan bahwa audit Internal juga berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian kondisi ini memperlihatkan bahwa internal Audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud. Peran audit internal akan semakin dapat diandalkan dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko dan tata kelolaan perusahaan sebagai terwujudnya suatu perusahaan yang baik dan sehat. Untuk itu seorang auditor internal agar selalu menjaga integritas dan secara berkesinambungan meningkatkan kompetensinya

serta selalu siap berada di depan dan menjadi mitra yang profesional (bpkp.go.id, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Bulog Divisi Regional Jawa Timur. Diketahui, fungsi Bulog sebagai penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras, juga berdasarkan berita yang dimuat dalam media elektronik *okezone.com* (2016) mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi pada tanggal 20 oktober 2016, sedikitnya 10 kasus dugaan penyimpangan dilakukan oleh pejabat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG). Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perum Bulog, Wahyu Suparno mengungkapkan bahwa 10 kasus itu rata-rata dilakukan oleh pejabat strategis lingkungan Perum Bulog, baik divisi pusat maupun regional. Beliau menjelaskan, bentuk penyimpangan yang dilakukan para pejabat itu beragam. Diantaranya adalah memalsukan hasil timbangan beras, sengaja mengubah harga pembelian pemerintah (HPP) dari petani dan dinaikkan secara sepihak, lalu kasus lainnya adalah kasus pembayaran raskin yang nunggak.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, penelitian ini akan menguji kembali atas “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Potensi Kecurangan (Fraud) Di BUMN”. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan tema tersebut karena belum dilakukannya dalam penelitian sebelumnya dengan tema yang sama di Bulog. Sedangkan penelitian terdahulu hanya melakukan penelitiannya di perusahaan swasta saja. Selain perbedaan objek penelitian, perbedaan penelitian ini juga terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menambah variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian Dianingtyas (2016)

hanya menggunakan variabel Gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel dependen.

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu selain meneliti dengan tema yang sama juga sama-sama menggunakan perhitungan statistik, yang mana data yang digunakan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah penelitian sebagi berikut :

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap potensi kecurangan?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan?
3. Apakah sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan?
4. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap potensi kecurangan
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap potensi kecurangan
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap potensi kecurangan

4. Untuk mengetahui pengaruh Peran Audit Internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dalam bidang Akuntansi Sektor Publik melalui eksplorasi mendalam tentang makna terhadap subjek penelitian yaitu potensi kecurangan (*fraud*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi para praktisi agar lebih berhati-hati terhadap adanya potensi kecurangan dalam proses kegiatan operasional perusahaan yang berlangsung.

3. Manfaat Kebijakan

Dalam tataran kebijakan, para perusahaan sektor publik diharapkan lebih memperkuat kembali kebijakan-kebijakan internal seperti sistem, dan regulasi-regulasi dalam meminimalisir terjadinya *fraud*.